



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 telah memuat berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Walaupun RPJMD ditetapkan sebelum RPJMN Tahun 2015-2019 disahkan, namun program pembangunan Kalimantan Timur telah sejalan dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nawa Cita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

Prioritas pembangunan dalam agenda pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 disusun dalam upaya pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas. Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2016.
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meletakkan fondasi dasar bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan TRISAKTI yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi dan lebih berpribadian dalam bidang kebudayaan.



3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan provinsi.
4. Merupakan respon terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2016.
5. Pengembangan sektor unggulan ekonomi atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Dokumen RKPD merupakan tahapan pelaksanaan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Berdasarkan evaluasi kinerja dan isu strategis pembangunan, maka Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 yang tertuang dalam RPJMD seperti Gambar 4.1. masih relevan digunakan.

Gambar 4.1
Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur,
RKPD Tahun 2014-2018



Adapun Tema pembangunan pada (RKPD) tahun 2016 ditetapkan, yakni: **“Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah”**. Tema RPKD 2016 mencerminkan prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan potensi unggulan ekonomi daerah ke arah penciptaan nilai tambah ekonomi dan daya saing daerah serta dukungan percepatan pembangunan konektivitas infrastruktur. Tema RKPD tersebut relevan dengan tema



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 berdasarkan Perpres No. 60 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015, yaitu “ **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas** ”.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan selaras dengan Visi, Misi dan Nawa Cita Pemerintahan 2015-2019 sebagai berikut:

VISI:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Prioritas pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui sembilan agenda prioritas yang disebut **NAWA CITA**, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;



3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sejalan dengan Kebijakan **Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan 4 (empat) Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan** berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan yaitu: (1) Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; (2) Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi; (3) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; dan (4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah



- pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75;
 3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan;
 4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;
 5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
 7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah : (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase



- jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur); serta
8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki fungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Kebijakan dan sasaran pembangunan kewilayahan Kalimantan tersebut dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019).

Berdasarkan atas arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dan wilayah Kalimantan serta sesuai dengan RPJMD 2013-2018, maka tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim

Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun demikian, kita harus tetap meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat angka melek huruf. Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun 2010 pemerintah telah mencanangkan program Wajib belajar 12 tahun. Program ini harus terus



dilanjutkan dan dituntaskan agar anak-anak usia sekolah memperoleh haknya dalam pendidikan dan lebih berdaya saing. Untuk itu, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berkualitas perlu dilengkapi di semua daerah terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Di samping terus meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah telah mengembangkan 100 Puskesmas 24 jam selama kurun waktu 2009-2013 di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan program pelayanan kesehatan pada tahun-tahun mendatang agar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan menikmati hasil pembangunan daerah dapat terwujud.

Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,28;**
- 2. Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,60 persen;**
- 3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 11,00 tahun;**
- 4. Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 72,00 tahun; dan**
- 5. Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp. 50,65 juta.**

Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting dalam pencapaian pembangunan daerah. Mutu kesehatan masyarakat yang baik atau tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Timur juga harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau pelayanan kesehatan sehingga dapat mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain aspek kesehatan, kurikulum pendidikan berbasis penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja.



Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan terutama dalam aspek sosial masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri, jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran :

- 1. Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 5,35 persen;**
- 2. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 6,50 persen;**
- 3. Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli Rp.751.237,- dengan tingkat inflasi sebesar $4,0 \pm 1$; dan**
- 4. Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,33.**

Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Peningkatan ekonomi daerah dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar:**
 - a. 2,5-2,9 persen (Laju pertumbuhan ekonomi migas),**



- b. 7,7-8,3 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas), dan
 - c. 7,6-8,2 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara);
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah sebesar 8,00 persen;
 3. Tercapainya swasembada pangan sebesar 82,01 persen;
 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 1,62 persen;

Tujuan 4 : Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Oleh karena itu dalam perencanaan ke depan, tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, **“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,50”**.

Tujuan 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:



1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,30 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 80 (sangat baik); dan
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 76,00 (B+) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”.

Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukungan lingkungannya. Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah, namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 80,19; dan**
2. **Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO₂/US \$juta PDRB (tahun 2013) menjadi 1.350 ton CO₂/US \$ juta PDRB (tahun 2016).**

Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil atau target yang diharapkan dari suatu tujuan dengan formulasi terukur, spesifik, mudah dicapai, serta rasional sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur ditampilkan pada tabel 4.1.



Tabel 4.1
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016

Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal 2013	2016
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi				
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	76,71	77,28
	2. Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf (%)	98,30	98,60
	3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,60	11,00
	4. Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	71,40	72,00
	5. Meningkatnya pendapatan perkapita	Pendapatan per kapita (juta rupiah)	44,65	50,65
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan				
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	6. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	5,35
	7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	8,90	6,50
	8. Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	9,65	4±1
		Paritas daya beli/PPP (Rp)	649.850	751.237



Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal 2013	2016
	9. Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,36	0,33
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	1,59	2,5-2,9
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,17	7,7-8,3
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	7,47	7,6-8,2
	11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	6,50	8,00
	12. Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	82,01
	13. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	1,62
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata				
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6,50



Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal 2013	2016
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik				
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	15. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,20	6,30
		Opini BPK	WTP	WTP
	16. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 (baik)	80 (sangat baik)
	17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	76,00 (B+)
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim				
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	18. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	80,19
	19. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US \$ juta)	1.500	1.350

Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan akan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk SKPD) dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Dengan



mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2016 untuk beberapa indikator utama pembangunan daerah seperti tabel 4.2.

Tabel 4.2
Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran	Tingkat Kemiskinan
1. Samarinda	79,05	5,83	6,75	3,11
2. Balikpapan	80,89	6,45	7,25	2,34
3. Bontang	78,20	5,65	10,05	5,52
4. Berau	75,63	7,75	5,24	4,74
5. Paser	76,45	8,57	8,26	7,45
6. PPU	74,79	-	7,00	8,17
7. Kutai Barat	76,35	7,06	7,24	5,98
8. Kutai Timur	74,48	10,49	5,54	8,80
9. Kutai Kartanegara	76,57	20,30	6,47	3,85

Sumber : data diolah

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Prioritas pembangunan pada dasarnya berisi program dan kegiatan unggulan SKPD dengan skala prioritas paling tinggi (*output & outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan demikian dapat diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal sehingga langkah selanjutnya menyusun prioritas dan sasaran pembangunan serta program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan.



Dalam dokumen RJPMN 2015-2019 mempunyai beberapa sasaran pokok pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan tema yang memacu pembangunan nasional yang kuat, inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran pokok nasional antara lain sebagai berikut :

1. Ekonomi

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara nasional diarahkan untuk memberikan landasan utama sebagai persiapan keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) dan memasuki era sebagai negara maju berpendapatan tinggi pada Tahun 2030. Dalam mencapai tujuan untuk keluar dari MIT, perekonomian Indonesia harus tumbuh relatif tinggi secara berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut diperoleh berlandaskan penguatan struktur ekonomi, melalui penguatan sektor primer dan peningkatan industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah sesuai keunggulan wilayah, dan modernisasi sektor jasa didukung oleh ketersediaan layanan infrastruktur yang memadai dan handal. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan penguatan peranan UKM yang lebih besar, peningkatan jumlah kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja produktif (*decent jobs*), dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (*financial inclusion*). Selanjutnya ketahanan ekonomi juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus membangun ketahanan pangan, energi dan air.

2. Lingkungan

Pencapaian pembangunan di berbagai bidang dilakukan dengan tetap mengamankan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan yang dicerminkan pada langkah penurunan emisi GRK sebesar 26 persen pada 2019 (dari *Business as usual/BAU*), dan membaiknya Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran ini menggambarkan bahwa pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan sekaligus melaksanakan komitmen Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional. Selain itu, kapasitas kelembagaan penanganan bencana pada tingkat nasional dan daerah terus ditingkatkan.

3. Politik

Sasaran pokok dalam konsolidasi demokrasi adalah meningkatnya kualitas demokrasi substansial, ditandai dengan meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilu dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019. Sementara itu, sasaran pokok politik luar negeri Indonesia adalah menguatnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam berbagai kerja sama dan forum internasional. Salah satu sasaran penting adalah meningkatnya partisipasi Indonesia



dalam menjaga perdamaian dunia, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah PBB.

4. Hukum

Sasaran pokok dalam pembangunan hukum adalah terwujudnya sistem peradilan pidana dan perdata yang efisien, efektif, dan akuntabel bagi pencari keadilan, serta didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, dan operasional yang memadai. Sasaran juga ditujukan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. Sasaran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

5. Pertahanan dan Keamanan

Sasaran pokok dalam pembangunan sektor pertahanan dan keamanan adalah meningkatnya kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional melalui pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, peningkatan kepercayaan terhadap Polri, peningkatan kemampuan intelijen, pengamanan wilayah laut dan perbatasan, serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

6. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, sasaran pokok penguatan tata kelola adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien, yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

7. Kesejahteraan Rakyat

Sasaran pokok pembangunan kesejahteraan rakyat tercapainya penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah sebagai hasil pembangunan yang inklusif. Meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat tidak hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat atau penurunan kemiskinan, tetapi juga harus terlihat dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yaitu taraf pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat, serta terciptanya system perlindungan sosial masyarakat yang baik. Masyarakat Indonesia sejahtera yang dibangun juga harus mempunyai karakter dan jati diri bangsa yang kuat serta menjaga dan mengembangkan kebudayaannya.



8. Kewilayahan

Sasaran pokok dalam pemerataan pembangunan antar wilayah adalah menurunnya tingkat kesenjangan antar-wilayah yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kabupaten tertinggal, meningkatnya peran wilayah Luar Jawa dalam pembentukan PDRB serta lebih meningkat dan merata pelayanan dasar di berbagai wilayah Indonesia.

9. Kelautan

Sasaran pokok pembangunan kelautan adalah terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional, termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.

Pembangunan merupakan kesatuan yang utuh yang terintegrasi antara dokumen perencanaan satu dengan dokumen perencanaan lainnya. Pembangunan daerah merupakan salah satu breakdown dari pembangunan nasional. Sehingga pembangunan daerah harus menyelaraskan dan mengkombinasikan dengan pembangunan nasional. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hubungan Antara Dimensi Pembangunan Nasional
dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Daerah
1.	Bidang Pembangunan Ekonomi	1. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja; 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan; 3. Percepatan transformasi ekonomi; 4. Pengembangan agribisnis; 5. Peningkatan produksi pangan; 6. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan;
2.	Bidang Pembangunan Lingkungan	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3.	Bidang Pembangunan Politik	-
4.	Bidang Pembangunan Hukum	-
5.	Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan	-



No.	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Daerah
6.	Bidang Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
7.	Bidang Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	1. Percepatan pengentasan kemiskinan; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
8.	Bidang Pembangunan Kewilayahan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
9.	Bidang Pembangunan Kelautan	1. Percepatan transformasi ekonomi; 2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar

Sumber : Data diolah

Sebagai hirarki dari pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki keselarasan dalam pencapaian tujuan pada setiap tahapan pembangunan nasional. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang dirumuskan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki sinkronisasi terhadap kebijakan nasional bahkan internasional.

Pada perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan memiliki pengaruh signifikan dalam setiap capaian target indikator kinerja sasaran pembangunan. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan masukan pada setiap program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan sebagai bagian dari realisasi visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam perencanaan pembangunan memiliki *point of view* melalui kajian evaluasi pembangunan yang berasal dari ketersediaan data dan informasi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berikut kebijakan-kebijakan strategis pada pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dikaji melalui data dan informasi secara series maupun spasial.

1) Kebijakan Kewilayahan

- a. Pemekaran sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penentuan kebijakan berbasis tata ruang wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan kebijakan yang paling terlihat adalah terkait perekonomian wilayah dimana wilayah yang telah



mekar pada periode selanjutnya tidak mendapat subsidi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan wilayah pemekaranpun juga tidak memiliki sharing terhadap hasil produksi perekonomian wilayahn Kalimantan Utara. Selain itu, pemekaran wilayah berdampak pada berkurangnya beban tanggungan wilayah terpencil, terdalam, dan terluar di Kalimantan Timur, mengingat sebagian wilayah sulit di Kalimantan Timur telah mekar menjadi Kalimantan Utara seperti Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

- b. Permasalahan yang menjadi fokus perhatian pemerintah di bidang kependudukan adalah distribusi penduduk yang masih timpang antar kabupaten di wilayah Kalimantan Timur. Wilayah perkotaan masih menjadi primadona domisili penduduk untuk mencari nafkah penghidupannya dan wilayah kabupaten yang notabene memiliki wilayah lebih luas hanya memiliki penduduk yang tidak seimbang dengan luas wilayahnya. Perlu adanya kebijakan terkait pengembangan perekonomian daerah untuk meningkatkan daya tarik penduduk agar berdomisili di wilayah tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan dalam pengembangan wilayah untuk menyeimbangkan persebaran penduduk adalah sebagai berikut :
 - a. Memisahkan antara pusat pemerintahan, pusat jasa perdagangan, dan pusat perindustrian sehingga perkembangan daerah dapat lebih merata. Pelaksanaan kebijakan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas aksesibilitas wilayahantar pusat kegiatan.
 - b. Pengembangan wilayah pelosok yang memiliki sektor produksi unggulan Kalimantan Timur seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan penggalian, termasuk sektor lapangan usaha yang memiliki “masa depan” dalam partisipasi peningkatan perekonomian Kalimantan Timur.
 - c. Terkait poin kedua, wilayah *hinterland* harus mendapatkan perhatian dalam pengembangan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dioptimalkan melalui peningkatan aksesibilitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah *hinterland*-nya.
 - d. Efisiensi dan penguatan konektivitas antar wilayah di seluruh region Kalimantan Timur sebagai bagian dari pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah pelosok.



- e. Permasalahan yang akan menjadi pendukung utama pembangunan Kalimantan Timur jika dapat diatasi dengan baik adalah minimnya infrastruktur wilayah terutama terkait aksesibilitas antar wilayah. Rendahnya perkembangan sektor perhubungan di Kalimantan Timur menjadi penghalang pembangunan daerah secara menyeluruh di setiap wilayah karena aksesibilitas yang sulit dalam merealisasikan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan khusus dalam pengembangan wilayah berbasis infrastruktur perhubungan terutama daerah terpelosok, terpencil, dan terdalam. Terlebih lagi Provinsi Kalimantan Timur memiliki daerah perbatasan dengan negara tetangga yang harus diperhatikan pembangunan wilayahnya.

2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai program penanggulangan kemiskinan baik program nasional maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan mulai dari tahun pertama perencanaan pembangunan daerah hingga saat ini. Secara persentase, terjadi penurunan angka kemiskinan yang terjadi di setiap tahunnya hingga tahun 2013 mencapai 6,06 persen. Namun peningkatan angka kemiskinan terjadi pada kondisi Maret tahun 2014 yang mencapai 6,42 persen penduduk miskin yang mendiami wilayah Kalimantan Timur. Kenaikan ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing mengingat ketidakstabilan perekonomian saat ini memicu fluktuasi anggaran kebutuhan hidup masyarakat sehingga berdampak pada kondisi perekonomian rumah tangga. Dampak negatif yang mungkin terjadi adalah penurunan status rumah tangga hampir miskin dan rentan miskin menjadi rumah tangga miskin. Kebijakan yang progresif harus semakin ditingkatkan oleh pemerintah baik penanggulangan kemiskinan secara langsung dengan memberikan bantuan langsung (bantuan langsung tunai, raskin, dan sebagainya) maupun bantuan secara tidak langsung (keluarga harapan, jaminan kesehatan, hingga jaminan pendidikan). Kebijakan-kebijakan umum yang dapat dirumuskan dalam restrukturisasi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Dalam mengantisipasi gejolak harga kebutuhan masyarakat yang terjadi cukup fluktuatif akhir-akhir ini, pemerintah harus memaksimalkan fungsi dan peran Tim Penanggulangan Inflasi Daerah sebagai corong pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan hidup di pasar/wilayah.



- b) Koordinasi dengan pihak terkait (Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Badan Pusat Statistik, Wakil Kepala Daerah) dalam hal pemutakhiran Basis Data Terpadu Rumah Tangga Sasaran sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas penerima bantuan sosial baik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pokok sehari-hari.
- c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aset jangka panjang bagi pemerintah provinsi dalam menanggulangi kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam keterampilan maupun pendidikan akan memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Peningkatan kualitas kesehatan juga menjadi modal utama masyarakat dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya sehingga baiknya derajat kesehatan masyarakat akan berkorelasi positif dengan pergerakan ekonomi wilayah.

3) Kebijakan Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama pelaksanaan pembangunan berbasis ketenagakerjaan mengingat setiap individu adalah obyek sekaligus obyek pembangunan. Oleh karena itulah, kebijakan pembangunan terkait ketenagakerjaan sangat rentan terhadap keberhasilan capaian pembangunan terlebih lagi jika dikaitkan dengan kualitas SDM. Kebijakan ketenagakerjaan akan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung utama individu dalam mencari penghidupan yang layak baik melalui pencarian lapangan kerja maupun berusaha. Produktivitas masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian juga menjadi dasar utama pencapaian keberhasilan pembangunan. Namun perlu digarisbawahi terkait asal sumber daya manusia yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Timur apakah berasal dari regional atau dari daerah lain sebagai migran. Kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan akan memicu pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni peningkatan kesejahteraan sosial jika diimbangi dengan konsistensi pemberian kehidupan layak bagi tenaga kerja. Berikut kebijakan pembangunan terkait ketenagakerjaan yang menjadi sorotan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur ke depannya:

- a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) melalui akselerasi kualitas pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya akan memberikan nilai lebih dalam persaingan ketenagakerjaan di pasar kerja. Semakin berkualitas SDM di Provinsi Kalimantan Timur, maka akan meningkat pula kualitas dan kuantitas setiap faktor



produksi penggerak roda perekonomian wilayah sehingga menghasilkan *output* positif bagi pembangunan Kalimantan Timur.

- b. Efektivitas keluarga berencana harus kembali digalakkan karena keluarga berencana akan menjadi pola dasar utama dalam pembentukan karakteristik distribusi penduduk terutama dalam pengelompokan umur. Angka ketergantungan yang merupakan indikator beban tanggungan usia produktif untuk memberi dukungan penghidupan bagi usia non produktif harus menjadi perhatian mengingat keseimbangan diperlukan dalam indikator ini. Selain itu, *booming* jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan pasar kerja akan meningkatkan potensi pengangguran.
- c. Pemetaan tenaga kerja perlu dilaksanakan baik berdasarkan kelompok umur (terkait produktivitas tenaga kerja), pendidikan, hingga asal daerah sebagai dasar pembentukan kerangka ketenagakerjaan di Kalimantan Timur untuk melihat sejauh mana pasar kerja dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai analisis. Hasil analisis ini akan memberikan masukan bagi setiap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan (pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, pengangguran terdidik, tenaga kerja berpendidikan rendah, dsb) yang masih cukup tinggi di Kalimantan Timur.
- d. Peningkatan lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja berbagai skill menjadi opsi positif dengan melaksanakan KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta). Namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia terlebih dahulu melalui pelatihan keterampilan kerja.
- e. Kehidupan layak tenaga kerja beserta keluarga harus diperhatikan pemerintah melalui peningkatan pendapatan riil (uang, barang, maupun jasa).

4) Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Isu strategis internasional dan nasional yang terus menjadi sorotan publik adalah degradasi lingkungan hidup yang semakin memberikan ancaman bagi kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan akan menjadi prioritas di setiap program dan kegiatan pembangunan mengingat urgensinya perhatian terhadap kualitas lingkungan hidup. Dalam porsinya sebagai salah satu penyokong paru-paru dunia, Provinsi Kalimantan Timur mengalami degradasi lingkungan yang cukup signifikan dengan adanya pengembangan beberapa sektor ekonomi terutama pertambangan dan penggalian



sumber daya alam. Oleh karena itu, poin-poin pembangunan keberlanjutan di setiap kebijakan yang diambil akan menjadi salah satu penentu keberhasilan capaian tujuan internasional maupun nasional dalam mengatasi permasalahan lingkungan ini. Kebijakan secara umum yang dapat dirumuskan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota perihal pengetatan ijin usaha pertambangan sektor dominan perkembangan ekonomi di Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki efek negatif berupa degradasi lingkungan hidup.
- b. Memberikan batasan kepada perusahaan dalam menggali kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan pengawasan yang melekat dan profesional sebagai bagian dari monitoring minimalisasi kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas sektor perekonomian.
- c. Mengoptimalkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan-perusahaan yang memproduksi di wilayah Kalimantan Timur terutama dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- d. Restrukturisasi penataan kota yang lebih ramah lingkungan, bersih, teratur, sehat, dan nyaman untuk dihuni terutama daerah-daerah perkotaan dan kumuh di wilayah Kalimantan Timur. Termasuk di dalamnya penataan sistem persampahan, penyediaan air bersih, hingga masalah kelistrikan rumah tangga.

5) Kebijakan MDG's (Pergeseran Transformatif)

Millenium Development Goals (MDG's) merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk membawa pembangunan daerah ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, maupun bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Namun, pada tahun 2015 sudah menjadi batas capaian MDG's sehingga dirumuskanlah lima pergeseran transformatif dalam laporan *High-Level Panel of Eminent Persons* (HLPEP), yakni:

- a. Mengakhiri kelaparan dan *extreme poverty*;
- b. Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;



- c. Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan *growth* dengan pembangunan berkelanjutan;
- d. Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e. Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor – pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Kebijakan yang harus diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam *pencapaian* MDG's merupakan suatu kesatuan utuh arah kebijakan pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan antara bidang urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dalam dokumen perencanaan, kebijakan pencapaian MDG's sudah terakomodasi dalam setiap kebijakan pembangunan daerah baik terkait bidang penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, dan sebagainya.

Berdasarkan atas tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, maka prioritas pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan dan sasaran RKPD 2016 disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (Sesuai Dokumen RPJMD)

No	Sasaran Pembangunan (RPJMD)	Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Meningkatnya angka melek huruf 3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	(1) Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan (2) Peningkatan kesempatan belajar anak
2.	4. Meningkatnya angka harapan hidup	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	(1) Peningkatan mutu di bidang kesehatan



No	Sasaran Pembangunan (RPJMD)	Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	5. Menurunnya tingkat kemiskinan	Percepatan pengentasan kemiskinan	(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja (2) Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
4.	6. Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	(1) Peningkatan kualitas tenaga kerja
5.	7. Meningkatnya pendapatan per kapita 8. Menurunnya Indeks Gini 9. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengembangan ekonomi kerakyatan	(1) Pengarusutamaan Gender (2) Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang (3) Peningkatan investasi sektor UMKM (4) Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga
6.	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 11. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah	Percepatan transformasi ekonomi	(1) Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global (2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (3) Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) (4) Peningkatan ekspor produk olahan



No	Sasaran Pembangunan (RPJMD)	Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah	Pengembangan agribisnis	(1) Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah (2) Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis (3) Penerapan Inovasi Teknologi agribisnis (4) Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah
8.	13. Tercapainya swasembada pangan	Peningkatan produksi pangan	(1) Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan (2) Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian (3) Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi (4) Peningkatan infrastruktur pertanian (5) Peningkatan produktivitas pertanian (6) Perbaikan tata niaga produk pangan
9.	14. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	(1) Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (2) Peningkatan rasio elektrifikasi
10.	15. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	(1) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi (2) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat



No	Sasaran Pembangunan (RPJMD)	Prioritas Pembangunan (RPJMD)	Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
			pertumbuhan (3) Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
11.	16. Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi 17. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 18. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	(1) Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus (2) Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
12.	19. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 20. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	(1) Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan (2) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan. (3) Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (<i>green economy</i>) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (4) Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi (5) Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan (6) Penegakan hukum lingkungan (7) Penurunan emisi gas rumah kaca (8) Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah



Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RKPD 2016, dirumuskan 119 program prioritas pembangunan dengan target seperti disajikan pada tabel 4.5.



Tabel 4.5
Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan	1	Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	98,30	98,50	Dinas Pendidikan
		2	Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD	49,77	65	
		3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	97,68	97,88	
				Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	113,75	113,85	
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	89,12	90,50	
				Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	97,77	98,05	
		4	Program pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	76,49	77,00	
				Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	87,51	88,70	
		5	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Angka Partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi	21,55	16,46	
		6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	67,30	60,00	



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	1/2 buku/tahun	1/5 buku/tahun	Badan Perpustakaan Daerah
		8	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah	55,57	34	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	9	Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9,18	10,5	Dinas Kesehatan
		10	Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9,18	10,5	Dinas Kesehatan, Rsj Atma Husada Mahakam, Rsud Aws, Rsud Kanojoso, Rsud Tarakan
		11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9,18	10,5	Dinas Kesehatan, Rsj Atma Husada
		12	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)	85	91	Dinas Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS	0,03	<1	Dinas Kesehatan
				Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	83,3	98,5	Dinas Kesehatan
				Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0,75	1,3	Dinas Kesehatan
				Tingkat kematian akibat malaria	1	4,8	Dinas Kesehatan ,
				Prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk	74.28	220	Dinas Kesehatan
				Persentase keberhasilan pengobatan TB	82.6	89	Dinas Kesehatan
				Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	22,5	40	Dinas Kesehatan ,
		14	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21	19	Dinas Kesehatan , Rsud Aws, Rsud Kanujoso, Rsud Tarakan
				Angka Kematian Balita per 1000 KH	31	28	Dinas Kesehatan ,
				Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	177	132	Dinas Kesehatan, Rsud Aws, Rsud



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
							Kanujoso, Rsud Tarakan
		15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	65	75	Dinas Kesehatan
5	Pengembangan ekonomi kerakyatan	16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP	UMP = KHL	UMP = KHL	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi
		17	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	80	80	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi
		18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	61,85	62,59	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
3	Percepatan pengentasan kemiskinan	19	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB (%)	0,16	0,65	Dinas Pendidikan
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB (%)	2,87	1,30	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	26,64	24,5	
		20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)	100	75	Dinas Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		21	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)	1,08	1,09	Dinas Sosial
		22	Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum (%)	92	100	Biro Ekonomi
		23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat Miskin perdesaan yang melakukan usaha ekonomi Agribisnis melalui memanfaatkan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program (jiwa)	0	3.888	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa
		24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif (%)	42,59	51,11	Dinas Sosial
		25	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (%)	9.40	14,20	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		26	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk miskin yang terserap di dunia kerja	0	500	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu (desa)	7	21	Dinas Kehutanan
		28	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian (%)	7	30	Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan
		29	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan	0	150	Dinas Peternakan
		30	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	Persentase meningkatnya daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam (%)	0	47,92	Badan Penanggulangan Bencana
		31	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT yang memiliki sarana dan prasarana dasar rumah sederhana sehat (%)	26	35	Dinas Pekerjaan Umum
4	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	32	Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)	Jumlah tenaga terampil bidang jasa kontruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)	0	480	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		33	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserp di Pasar Kerja (%)	99,63	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		34	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	71	200	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan Umkm
		35	Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif,Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (WUB)	1.185	3.000	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
		36	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Unggulan (koperasi)	7	20	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan Umkm
		37	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kexakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha (%)	0,04	0,03	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		38	Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif	Prosentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru (%)	25	15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	50,15	32	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		40	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri (%)	12	20	Dinas Sosial



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
5	Pengembangan ekonomi kerakyatan	41	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prosentasi Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	62,20	87,89	Bappeda
		42	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	rasio pasar per 10.000 penduduk	0.96	0,98	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
		43	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kesetabilan harganya	3	250	Biro Ekonomi
		45	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai persetujuan Investasi (triliun)	39,53	49,90	Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah
		46	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Rata-rata hari proses perijinan investasi (hari)	5	2	Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah
		47	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah industri inti pengolahan khas daerah	2	6	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
		48	Program Penataan Struktur Industri Hulu Hilir	Volume Usaha kawasan Industri (triliun)	127,97	150	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan UMKM



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		49	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1.2	1,6	Dinas Perkebunan
		50	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor (IKM)	7	6	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
		51	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	80	88	Dinas Peternakan
		52	Program Pengembangan Produk-produk Perkebunan Unggulan daerah	Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	0	4	Dinas Perkebunan
		53	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	40	11	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
		54	Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produksi olahan Non migas dan non batubara (juta US\$)	3,79	9	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
		55	Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan Derawan dan sekitarnya (Orang)	72.000	84.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		56	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan (juta orang)	1,45	1.024	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
7	Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	74	Program diversifikasi energi	Prosen bauran Energi baru terbarukan (%)	0,5	1,5	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN, dan Swasta
		75	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	145	390	Dinas Peternakan
		76	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	70	73	Dinas Pertambangan Dan Energi
		77	Program pengembangan listrik pedesaan	Prosentase desa berlistrik (%)	93,57	93	Dinas Pertambangan Dan Energi
8	Pengembangan agrobisnis	57	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non sawit	Luas area Komoditas Unggulan Perkebunan (4 Komoditas)	228.000	146.656	Dinas Perkebunan
		58	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan (Ha)	5	15	Dinas Peternakan
		59	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan(juta US\$)	19,52	15,6	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		60	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri olahan non migas	Kontribusi industry olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)	24,93	32	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi &UMKM



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
9	Penguatan cadangan pangan	61	Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi Padi (GKB)(Ton)	432.606	566.9	Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan
		62	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktifitas Unggulan Pertanian (ton/ha)	4,31	4,7	Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan
		63	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas (orang)	632	985	Badan Ketahan Pangan Dan Penyuluhan
		64	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL, Perikanan Berkualitas	143	100	Badan Ketahan Pangan Dan Penyuluhan
		65	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah BPP (unit)	85	120	Badan Ketahan Pangan Dan Penyuluhan
		66	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	1	3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		67	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (Ha)	4.922 dari 1.072	5.850	Dinas Pekerjaan Umum
		68	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian / perkebunan)	Ketersediaan pangan Daerah (%)	73,87	91.19	Badan Ketahan Pangan Dan Penyuluhan
		69	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Daging (ton)	54.927	54.44,2	Dinas Peternakan



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		70	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	118.520	244.883	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		71	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	109.146	153..534	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		72	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian	30	61	Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan
		73	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	110,11	99,5	Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan
10	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	78	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas mampu diatas 10 ton (%)	4,11 (43,15+K 103:K104 KM)	27.8	Dinas Pekerjaan Umum
		79	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan (%)	52,20 (849,85 Km)	80,69	Dinas Pekerjaan Umum
		80	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	34,11	95,46	Dinas Pekerjaan Umum
		81	Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (%)	0	35	Dinas Pekerjaan Umum



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		82	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas dan Penumpang	324.765.350 tondan 11.650.500 org	330.500.000 ton dan 14.750.000 org	Dinas Perhubungan
		83	Program pembukaan keterisolasian wilayah sector jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi (kecamatan)	13	8	Dinas Pekerjaan Umum
		84	Program pembukaan keterisolasiang wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan (kecamatan)	13	9	Dinas Perhubungan
		85	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	3	3	Dinas Perhubungan
		86	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)	60 (Kaltim dan Kaltara)	70	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		87	Program penyediaan dan pengelohan air baku	Kapasitas air baku (lt/dtk)	0	780	Dinas Pekerjaan Umum



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		88	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah	Cakupan layanan air minum (%)	38	44	Dinas Pekerjaan Umum
		89	Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air	Prosentase penyediaan air baku kawasan Industri (%)	2	20	Dinas Pekerjaan Umum
		90	Program Pengendalian Banjir	Luas Genangan Banjir (Ha)	450	420	Dinas Pekerjaan Umum
		91	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis (DAS)	35	33	Dinas Pekerjaan Umum
11	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	92	Program Penguatan Kelembagaan PTSP	Menurunnya Tingkat Korupsi	4,9	6,3	Biro Organisasi
		93	Program Pengembangan Zona Integritas	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	1	3	Inspektorat
		94	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Menurunnya Kasus KKN	0	2	Inspektorat
		95	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi	WDP	WTP	Biro Keuangan
		96	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Prosentase Kab/kota yang memperoleh opine WTP (%)	30	50	Biro Keuangan



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		97	Program peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	76,15	79	Biro Organisasi
		98	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (%)	50	97	Badan Kepegawaian Daerah
		99	Program Integrasi Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi	0	10	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		100	Pengembangan data statistic dan spasial	Tingkat keterkaitan data & informasi perencanaan pembangunan (%)	73	89	Bappeda
		101	Program Peningkatan Kualitas Manajemen berbasis kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah prov.	70,97 (B+)	76 (B+)	Biro Organisasi
		102	Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat kinerja penyelenggaraan Pemprov	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Inspektorat
				% Ka/kota yang memperoleh status tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggara	50	60	Inspektorat
		103	Program Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi (%)	68.13	72	Kesbangpol



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	104	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH (Unit)	3	10	Dinas Kehutanan
		105	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	11.160,25	122.500	Dinas Kehutanan
		106	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggara tata ruang	82,06	73,83	Dinas Pekerjaan Umum
		107	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman (ha)	20	230	Dinas Kehutanan
		108	Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan (kawasan)	0	4	Dinas Kehutanan
		109	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	37,67	37	Dinas Pertambangan Dan Energi
		110	Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan	Jumlah emisi yang diturunkan (CO2eq)	1.611	281.25	Dinas Perkebunan
		111	Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah perusahaan yang dinilai (perusahaan)	227	225	Badan Lingkungan Hidup
		112	Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH	Indeks kualitas lingkungan hidup (Hari/Tahun Status ISPU baik)	75,24	80,19	Badan Lingkungan Hidup
		113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kota yang mendapat Adipura (kab/kota)	4	6	Badan Lingkungan Hidup



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja		SKPD
					Capaian 2014	Target 2016	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		114	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat Adiwiyata (sekolah)	258	308	Badan Lingkungan Hidup
		115	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	PPLHD dan PPNS (orang)	PPNS = 22, PPLHD = 74	PPNS = 26, PPLHD = 78	Badan Lingkungan Hidup
		116	Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Perda/Pergub	1	0	Badan Lingkungan Hidup
		117	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan gren ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	4	2	Bappeda
		118	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Intensitas Emisi (ton/1 jt US\$)	1.611	1.384	Badan Lingkungan Hidup
		119	Investasi emisi gasrumah kaca	Ketersediaan dan level emisi yang terukur serta dapat di verifikasi (kali PEP/tahun)	1	2	Badan Lingkungan Hidup

